



L K j I P

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

TAHUN 2022

BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah, di dalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik. LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan salah satu visi dan misi Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu *“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Profesional dengan Berbasis Teknologi Informasi”*.

Penyajian LKjIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan.

Selanjutnya LKjIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 yang kami sajikan ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 19690116 199009 1 001

K E P A L A B K D
KOTA PAYAKUMBUH

ALAMAT

JL. VETERAN EX POLIKO LT 3
BADAN KEUANGAN DAERAH

Payakumbuh, Januari 2023

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. GAMBARAN UMUM DINAS | 2 |
| C. TUGAS dan FUNGSI | 4 |
| D. ISU STRATEGIS | 8 |
| E. LANDASAN HUKUM | 9 |
| F. SISTEMATIKA PENULISAN | 9 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 11 |
| A. RENCANA STRATEGIS | 11 |
| 1. Visi | 13 |
| 2. Misi | 14 |
| 3. Tujuan dan Sasaran | 14 |
| 4. Strategi dan Arah Kebijakan | 15 |
| B. INDIKATOR KINERJA UTAMA | 16 |
| C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 | 17 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 19 |
| A. CAPAIAN KINERJA | 19 |
| 1. Kerangka Pengukuran Kinerja | 19 |
| 2. Capaian Indikator Kinerja Umum | 21 |
| 3. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis | 24 |
| 4. Akuntabilitas Keuangan | 48 |
| 5. Prestasi dan Penghargaan | 50 |
| BAB IV PENUTUP | 51 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Keuangan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM BADAN

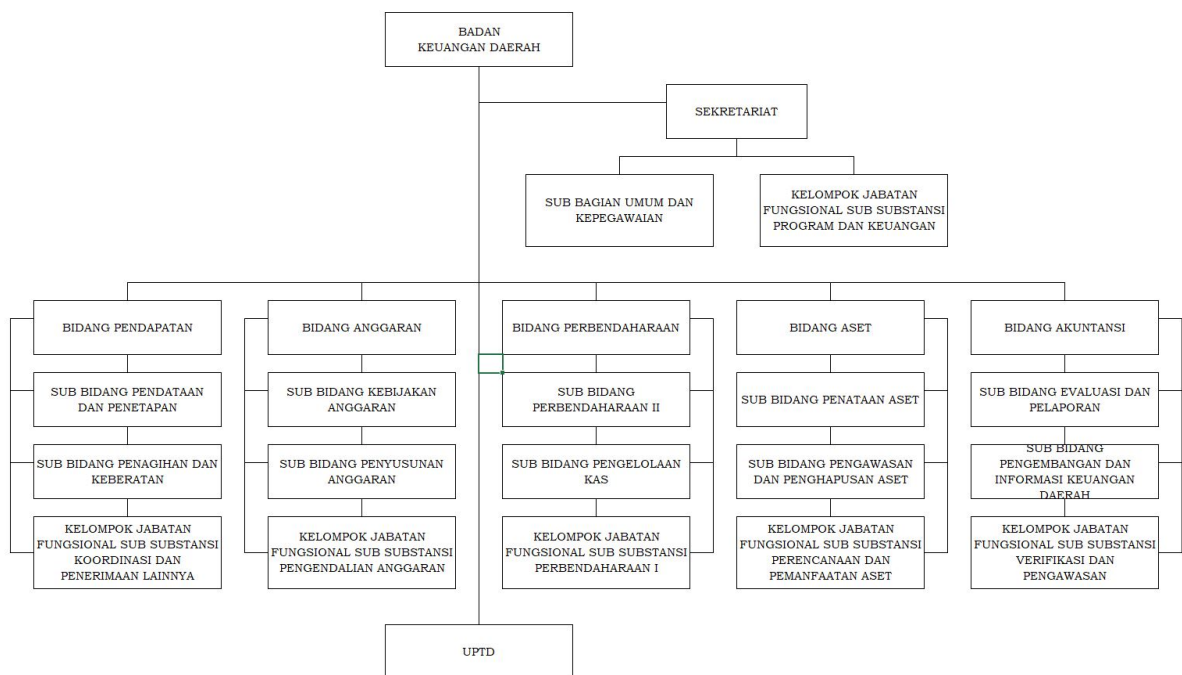
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 5 (lima) Bidang yang terdiri dari Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset, serta terdiri dari 2 (dua) UPTD, antara lain UPTD-Pajak Daerah dan UPTD-Fasilitas Pembiayaan.

Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh berjumlah 62 Orang, dimana terdapat pembagian staf yang tidak merata disetiap bidangnya. Keadaan ini mengakibatkan adanya kekosongan posisi staf di bawah jabatan Kasubid di bidang bidang tertentu. Selanjutnya dapat dilihat Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagai berikut ini :

1. Kepala Badan : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 1 Orang
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Program dan Keuangan : 1 Orang
3. Kepala Bidang Pendapatan : 1 Orang
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan : 1 Orang
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan : 1 Orang
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Koordinasi dan Penerimaan Lainnya : 1 Orang

4. Kepala Bidang Anggaran : 1 Orang
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran : 1 Orang
 - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran : 1 Orang
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kebijakan Anggaran : 1 Orang
5. Kepala Bidang Perbendaharaan : 1 Orang
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas : 1 Orang
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan II : 1 Orang
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perbendaharaan I : 1 Orang
6. Kepala Bidang Aset : 1 Orang
 - a. Sub Bidang Penataan Aset : 1 Orang
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset : 1 Orang
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Pemanfaatan Aset : 1 Orang
7. Kepala Bidang Akuntansi : 1 Orang
 - a. Subid Evaluasi dan Pelaporan : 1 Orang
 - b. Subid Pengembangan dan Informasi Keuangan Daerah : 1 Orang
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Verifikasi dan Pengawasan : 1 Orang
8. Unit Pelayanan Teknis Badan , terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Fasilitasi Pembiayaan : 1 Orang
 - Kasubag Tata Usaha : 1 Orang
 - b. Kepala UPTD Pajak Daerah : 1 Orang
 - Kasubag Tata Usaha : 1 Orang
9. Kelompok Jabatan Fungsional AKPD : 11 Orang
10. Pelaksana Golongan III : 15 Orang
11. Pelaksana Golongan II : 5 Orang

Berikut Bagan Struktur Organisasi pada Badan Keuangan Daerah:



C. TUGAS dan FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintah dalam Bidang Keuangan dan Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Adapun Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh adalah

- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut Uraian tugas dan fungsi dari struktur yang ada :

Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan daerah
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan daerah
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi

Sekretaris

Mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Badan, penyelenggaraan administratif umum, surat menyurat, kepegawaian, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan Badan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
4. Pengorganisasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
5. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsi

Kepala Bidang Pendapatan

Bidang pendapatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan.

Bidang pendapatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang pendapatan
2. Penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan
4. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendapatan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Kepala Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang anggaran.

Bidang anggaran mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang anggaran
2. Penyelenggaraan kegiatan bidang anggaran
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang anggaran
4. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang anggaran
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Kepala Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Perbendaharaan
2. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perbendaharaan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan
4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Kepala Bidang Aset

Bidang aset mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang aset.

Bidang aset mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional bidang aset
2. Penyelenggaraan kegiatan bidang aset
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang aset
4. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang aset
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Kepala Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang akuntansi.

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang akuntansi
2. Penyelenggaraan kegiatan bidang akuntansi
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi
4. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang akuntansi
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

D. ISU STRATEGIS

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kota yang memberikan pelayanan kepada masyarakat disamping pelayanan yang diberikan kepada aparatur daerah.

Dalam rangka pemberian pelayanan ini tentu saja masih terdapat permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan APBD masih terdapat penganggaran belanja daerah yang belum sesuai dengan aturan yang ada, hal ini terjadi karena masih adanya OPD yang masih kurang taat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.
2. Dalam proses pencairan anggaran, masih terdapat ketidakakurasian penatausahaan keuangan daerah akibat masih rendahnya frekuensi rekonsiliasi OPD dengan bidang perbendaharaan.
3. Masih belum tertibnya OPD dalam pengelolaan barang milik daerah seperti RKBMD yang tidak tepat waktu dan belum akurat akibat masih rendahnya intensitas rekonsiliasi asset dari pengelola barang.
4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum akuntabel akibat belum terintegrasinya sistem pelaporan keuangan daerah dengan aplikasi lainnya.
5. Sistem informasi keuangan daerah yang masih dalam pengembangan serta belum ditunjang dengan sarana dan prasarana TI yang berkualitas.
6. Masih belum sinerginya fasilitasi yang diberikan untuk instansi pemungut pajak daerah sehingga data objek pajak yang disediakan juga belum akuntabel.
7. Masih rendahnya penerimaan dari pajak daerah akibat belum sempurnanya SOP tentang pemungutan pajak daerah.
8. Belum tersedianya database potensi pajak yang potensial akibat belum sempurnanya sarana dan prasarana pendukung pencatatan objek pajak daerah.

9. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akibat kesadaran wajib pajak yang rendah serta regulasi yang mengatur tentang wajib pajak yang masih lemah.

E. LANDASAN HUKUM

LKJIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 disusun dengan bentuk:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematisa.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi, Analisis Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran serta Capaian Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Berisi penutup yang merupakan kesimpulan menyeluruh dari penyajian LKjIP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang menjadi pedoman perencanaan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menunjang pencapaian sasaran Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisi visi, misi, kebijakan strategis, program pokok dan prioritas yang akan dilaksanakan Kepala Daerah.

RPJMD Kota Payakumbuh telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebagai pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. RPJMD Kota Payakumbuh juga telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 pada tanggal 29

Desember 2020, maka Badan Keuangan Daerah harus menyelaraskan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sesuai dengan arah dan kebijakan serta visi misi yang tertuang pada Perubahan RPJMD dimaksud.

Kondisi saat ini adanya pandemi covid-19 yang tergolong ke dalam bencana non alam yang mengakibatkan krisis ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis. Hasil proyeksi Provinsi Sumatera Barat pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh tahun 2020 diperkirakan hanya sebesar 1,18 % dan tahun 2021 mencapai 4,18. Hasil proyeksi ini juga merubah indikator makro ekonomi lainnya seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio. Perubahan pada proyeksi indikator makro ini akan berpengaruh kepada proyeksi dan target indikator lainnya yang berhubungan langsung dengan indikator makro ekonomi yang berubah. Selain hal tersebut di atas, juga terjadi perubahan yang mendasar terhadap kebijakan perencanaan yang mengubah struktur belanja seluruh nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD, tak terkecuali struktur belanja pada Badan Keuangan Daerah.

Hal lain yang mendorong dilakukannya Perubahan Renstra adalah terkait kebijakan mendasar yang meliputi :

1. Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa proses perencanaan harus melalui SIPD Nasional; dan
3. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.
4. Pemutakhiran sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini secara umum diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

1. Menggambarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta indikator kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun sesuai Perubahan RPJMD Kota;
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun. Dengan demikian Renja Perangkat Daerah akan selaras dengan Renstra Perangkat Daerah sehingga tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat tercapai dengan program dan kegiatan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya, Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Payakumbuh sebagai Kota yang Maju, Sejahtera dan Religius, Pro Rakyat, Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Yang berlandaskan Kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Visi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah : ***“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Profesional dengan Berbasis Teknologi Informasi “***.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas maka dilaksanakan misi sebagai berikut :

- 1 Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, ekonomis, akuntabel dan auditabel.
- 2 Menggali potensi dan meningkatkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan definisi di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh berdasarkan visi dan misi di atas adalah:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya kemandirian keuangan daerah;
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja BKD.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Berdasarkan definisi di atas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah adalah:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD.

Tujuan dan sasaran tersebut beserta indikator dan target Badan Keuangan Daerah dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Indikator | | | | | |
|----|---|---|---|------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Opini LKPD dari BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Terwujudnya kemandirian keuangan daerah | Meningkatnya capaian penerimaan PAD | Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah | 11,61% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 3 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja BKD | Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD | Nilai AKIP BKD oleh Inspektorat | BB | BB | A | A | A | A |

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan hal di atas, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran BKD dengan melakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh BKD untuk kurun waktu 2017- 2022 adalah :

1. Memelihara dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi, efisien dan akuntabilitas;
2. Optimalisasi sumber-sumber PAD;
3. Menerapkan Sistem AKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi dan kebijakan tersebut dapat tertuang dalam matrik berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Profesional dengan Berbasis Teknologi Informasi | | | | | |
| Misi 1 : Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, ekonomis, adil, merata, akuntabel dan auditabel | | | | | |
| | | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| M.1.1 | : | Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Memelihara dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi, efisien dan akuntabilitas | Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah |
| M.1.2 | : | Terwujudnya akuntabilitas kinerja BKD | Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD | Menerapkan sistim AKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan | Menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien |
| Misi 2 : Menggali potensi dan meningkatkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah | | | | | |
| | | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| M.2.1 | : | Terwujudnya kemandirian keuangan daerah | Meningkatnya capaian penerimaan PAD | Optimalisasi sumber-sumber PAD | Peningkatan kesehatan fiskal daerah |

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 900.31/SK/BKD-PYK/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang mana sebelumnya ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 900.26/SK/BKD-PYK/2021.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN/CARA PENGUKURAN |
|-----------|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini LKPD dari BPK | Opini atas pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP, WDP) |
| 2 | Meningkatnya Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah | Total PAD dibagi dengan total pendapatan daerah dikali 100% |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKD | Nilai AKIP BKD dari Inspektorat | Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat (A, BB, B) |

C. PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, yang mana dilakukan reuiu oleh tim kota atas pohon kinerja BKD kemudian diikuti dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Badan Keuangan Daerah

Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|------------|---|---|---------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Opini LKPD dari BPK | WTP |
| 2. | Meningkatnya capaian penerimaan PAD | Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah | 12% |
| 3. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP BKD dari Inspektorat | A |

Perjanjian kinerja tahun 2022 tidak berbeda dengan perubahan yang dilakukan pada perjanjian kinerja tahun 2021 yang mana pada sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah hanya diukur dengan indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK. Kemudian adapun indikator kinerja berikutnya yang sebelumnya ada yaitu penetapan perda APBD tepat waktu tidak lagi menjadi indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah namun menjadi cascade atau turun setingkat kepada bawahan langsung yang terkait dengan program dan kegiatan teknis dibidang yang ada pada Badan Keuangan Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 maupun Renja tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program juga sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan Daerah.

A. CAPAIAN KINERJA

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program juga sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

| Persentase | Predikat | KodeWarna |
|------------|------------------------|-----------|
| < 100% | Tidak Tercapai | |
| = 100% | Tercapai/Sesuai Target | |
| > 100% | Melebihi Target | |

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2021**

| NO. | Kategori | Rata-Rata % Capaian | KodeWarna |
|-----|---------------|---------------------|-----------|
| 1 | Sangat Baik | >90 | |
| 2 | Baik | 75.00 – 89.99 | |
| 3 | Cukup | 65.00 – 74.99 | |
| 4 | Kurang | 50.00 – 64.99 | |
| 5 | Sangat Kurang | 0 – 49.99 | |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2022.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program juga sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama BKD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 900.31/SK/BKD-PYK/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

2. Capaian Indikator Kinerja Umum

Dalam rangka mengukur kinerja dan peningkatan kinerja serta lebih kepada akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja (IKU). Untuk itu, penetapan IKU ini adalah hal yang pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil dari pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dirinci ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1 | Opini LKPD dari BPK | Opini BPK | WTP | WTP | 100% |
| 2 | Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persentase | 12 % | 18,01% | >100 % |
| 3 | Nilai AKIP BKD dari Inspektorat | Nilai AKIP | A | A | 100% |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada 1 indikator yaitu kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, dengan persentase capaian kinerja melebihi target yaitu 150,08 %.
- Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK, dengan capaian kinerja 100% karena Pemerintah Kota Payakumbuh berhasil memperoleh opini WTP sesuai target yang telah ditetapkan. Kemudian pada indikator Nilai AKIP BKD dari Inspektorat juga mencapai target 100% dengan diperolehnya nilai A.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan Keuangan Daerah pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis | Capaian |
|-----|-----------------------------|---------|
| 1 | Melebihi / Melampaui Target | 1 |
| 2 | Sesuai Target | 2 |
| 3 | Tidak Tercapai | - |

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel pencapaian misi sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Target Misi
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Misi | Jumlah Indikator Sasaran | Tingkat Pencapaian | | | | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------|----------------------|-----|-------------------------------|---|
| | | | Melampaui target (>100%) | | Sesuai Target (100%) | | Belum Mencapai Target (<100%) | |
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, ekonomis, akuntabel dan auditabel | 2 | | | 2 | 100 | | |
| 2 | Menggali potensi dan meningkatkan pengelolaan sumber-sumber PAD | 1 | 1 | 150,08 | | | | |
| | Jumlah | 3 | 1 | | 2 | | | |

Dari 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dapat dijabarkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

| No | Kategori | Jumlah Indikator | Presentase |
|----------|----------------------------|------------------|------------|
| A | Misi 1 | | |
| 1 | Melebihi/ Melampaui target | - | - |
| 2 | Sesuai Target | 2 | 100% |
| 3 | Tidak Mencapai Target | - | - |
| | | | |
| B | Misi 2 | | |
| 1 | Melebihi/ Melampaui target | 1 | 150,08% |
| 2 | Sesuai Target | - | - |
| 3 | Tidak Mencapai Target | - | - |

3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam angka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis dan perbandingan-perbandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran, dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 2 misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | % | Target akhir renstra | % |
|---------------------------|---------------------|-----------|------------|-----------|------|----------------------|------|
| | | | Target | Realisasi | | | |
| 1 | Opini LKPD dari BPK | Opini BPK | WTP | WTP | 100% | WTP | 100% |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | | 100% | | 100% |

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK.

Capaian kinerja indikator Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK adalah WTP dari target WTP yang direncanakan sebelumnya dan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2021 yaitu WTP.

Tahun 2022 adalah tahun terakhir renstra, capaian Tahun 2022 WTP bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Keuangan Daerah maka capaian kerjanya juga mencapai 100%. Opini Laporan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Kota Payakumbuh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini tercantum dalam Buku I Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 Nomor 31.A/LHP/XVIII.PDG/04/2022, serta Buku II Nomor 31.B/LHP/XVIII.PDG/04/2022 masing masing bertanggal 25 April 2022. Tahun sebelumnya opini ini juga diraih oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan terus dipertahankan untuk tahun-tahun selanjutnya sesuai dengan target Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh

Tahun 2017-2022. Keberhasilan ini didukung oleh kerja keras semua OPD di Pemerintah Kota Payakumbuh.

WTP adalah salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah. Payakumbuh adalah salah satu Kabupaten/Kota yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Sumatera Barat khususnya. Dengan telah diraihnya WTP dalam kurun waktu lebih dari 5 (lima) kali berturut-turut oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, ini membuktikan pencapaian kinerja keuangan sudah baik dan harus dipertahankan.

Gambar 3.1 Payakumbuh memperoleh Opini WTP



Opini WTP ini merupakan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 3 komponen penilaian yaitu :

- a. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2021
- b. Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern
- c. Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan

Kemudian pada akhir tahun 2021, telah dilakukannya reuiu atas pohon kinerja kota yang diikuti dengan reuiu atas pohon kinerja pada

seluruh OPD tidak terkecuali Badan Keuangan daerah, mengakibatkan 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja disesuaikan menjadi 3 indikator kinerja. Adapun indikator kinerja yang dihapus ada pada sasaran “meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah” tepatnya pada indikator penetapan Perda APBD tepat waktu. Indikator kinerja tersebut dihapus dari indikator kinerja utama Badan karena telah disepakati menjadi turunan/cascade pada jenjang ke bawah dari pohon kinerja level 3 atau pada eselon 3 dari struktur yang ada.

Adapun capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 4 kegiatan dan 25 sub kegiatan serta Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 kegiatan dan 8 sub kegiatan.

Gambaran tentang program, kegiatan, sub kegiatan, pagu, realisasi anggaran, serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.6
PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN
Anggaran dan Realisasi Terhadap Sasaran 1

Data Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Badan Keuangan Daerah

| No | SASARAN | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Keuangan | | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Masalah | Tinjut Rekomendasi DPRD | Ket |
|----|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 1.Persentase realisasi belanja terhadap anggaran (95%); 2.Persentase sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terhadap APBD (10%); 3.Laporan keuangan berbasis akrual (ada) | 1. 92,50% 2. 11,07% 3.ADA | 1. <100% 2. <100% 3.100% | 3.227.809.310 | 2.792.532.043 | 86,51% | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase dokumen penganggaran yang dihasilkan (100%) | 100% | 100% | 1.488.072.050 | 1.401.311.940 | 94,17% | - | - | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 29.236.700 | 22.286.044 | 76,23% | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 26.451.700 | 23.242.912 | 87,87% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|---|----------|--|--|
| | | | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 26.928.760 | 25.332.000 | 94,07% | | | | |
| | | | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 6.665.930 | 4.319.200 | 64,80% | Untuk percepatan disahkannya DPA SKPD, maka jadwal verifikasi hanya dilakukan dalam beberapa hari dan tidak diikuti oleh semua tim TAPD | | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah ttg APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | 1.293.204.200 | 1.233.338.657 | 95,37% | | | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah ttg Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran Perubahan APBD | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | 87.483.500 | 78.996.227 | 90,30% | | | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% | 18.101.260 | 13.796.900 | 76,22% | | | | |
| | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (100%) | 100% | 100% | 551.417.250 | 526.222.970 | 95,43% | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|----------|--|--|
| | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 3 kali | 100 | 100 | 4.924.850 | 4.539.500 | 92,18% | | | | |
| | | | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 100 | 94,19 | 100 | 7.113.300 | 7.053.800 | 99,16% | | | | |
| | | | Koordinasi , Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 100 | 88,03 | 100 | 78.166.950 | 77.942.180 | 99,71% | | | | |
| | | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dg Instansi Terkait | 100 | 99,10 | 100 | 461.212.150 | 436.687.490 | 94,68% | | | | |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan perangkat daerah (100%) | 100% | 100% | 601.728.910 | 571.627.285 | 95,00% | - | - | | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | 3.987.240 | 2.873.100 | 72,06% | | | | |
| | | | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 86 berita acara | 86 berita acara | 100% | 379.966.430 | 373.602.100 | 98,33% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|------------|------|------------|------------|--------|--|--|--|
| | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 21 dokumen | 21 dokumen | 100% | 32.233.760 | 28.229.150 | 87,58% | | | |
| | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 37 buku | 37 buku | 100% | 40.665.410 | 39.513.900 | 97,17% | | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 93 buku | 93 buku | 100% | 51.829.460 | 50.905.430 | 98,22% | | | |
| | | | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 13.986.110 | 11.605.930 | 82,98% | | | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 4 kali | 4 kali | 100% | 9.602.210 | 7.782.945 | 81,05% | | | |
| | | | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 7.066.790 | 6.344.450 | 89,78% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|
| | | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 6.538.240 | 6.118.500 | 93,58% | | | | |
| | | | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 81 orang | 81 orang | 100% | 42.609.920 | 35.386.940 | 83,05% | | | | |
| | | | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | 11 BLUD | 11 BLUD | 100% | 13.243.340 | 9.264.840 | 69,96% | Kegiatan pembinaan kepada SKPD BLUD dilakukan bersamaan dg jadwal pembinaan akuntansi untuk SKPD, hal ini kita sesuaikan dengan jadwal narasumber, sehingga efisiensi di belanja makan dan minum rapat | Akan dijadwalkan kembali di tahun 2023 | | |
| | | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan dan implementasi sistem terhadap data keuangan daerah (100%) | 100% | 100% | 353.373.970 | 293.369.848 | 83,02% | - | - | | |
| | | | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | 44 dokumen | 44 dokumen | 100% | 6.470.420 | 5.974.950 | 92,34% | | | | |
| | | | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 3 Aplikasi | 3 Aplikasi | 100% | 279.835.750 | 244.882.198 | 87,51% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------------------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 31 SKPD | 31 SKPD | 100% | 67.067.800 | 42.512.700 | 63,39% | Kegiatan pelatihan yang direncanakan untuk uji coba penggunaan penatausahaan pd aplikasi SIPD tidak bisa dilaksanakan karena aplikasi untuk uji coba belum ada, sehingga efisiensi belanja makan minum rapat, Atk, penggandaan dan cetak | Akan dilaksanakan pada tahun 2023 | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN BMD | Persentase PD dengan laporan aset sesuai peraturan pengelolaan BMD (90,32%) | 100% | 100% | 1.053.876.350 | 986.716.103 | 93,63% | | | | |
| | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase BMD yang tercaat pd MIA dan laporan KIB PD; Jumlah SKPD rekon tepat waktu; Buku SSHB yang dihasilkan; Persentase RKBMD yang diakomodir dalam APBD; Persentase BMD yang dihapus dibanding total usulan | 100; 25 PD; 100; 100; 80 | 100% | 1.053.876.350 | 986.716.103 | 93,63% | - | - | | |
| | | | Penyusunan Standar Satuan Harga | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 87.499.600 | 85.980.240 | 98,26% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|------------|------|-------------|-------------|--------|--|--|--|
| | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 41.734.360 | 32.622.390 | 78,17% | | | |
| | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 31 SKPD | 31 SKPD | 100% | 52.152.640 | 42.893.070 | 82,25% | | | |
| | | | Penilaian Barang Milik Daerah | 31 laporan | 31 laporan | 100% | 39.163.750 | 38.619.030 | 98,61% | | | |
| | | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 31 SKPD | 31 SKPD | 100% | 697.254.540 | 668.265.573 | 95,84% | | | |
| | | | Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 31 SKPD | 31 SKPD | 100% | 91.185.580 | 81.713.200 | 89,61% | | | |
| | | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 31 laporan | 31 laporan | 100% | 9.227.900 | 7.415.400 | 80,36% | | | |
| | | | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota | 31 OPD | 31 OPD | 100% | 35.657.980 | 29.207.200 | 81,91% | | | |

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ini disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung sistem pengelolaan keuangan daerah seperti peraturan walikota tentang standar biaya, standar satuan harga dan aturan lain yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
2. Adanya upaya untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia pengelola keuangan dengan dilaksanakannya bimtek akuntansi berbasis akrual.
3. Adanya dukungan teknologi informasi dengan dilakukannya pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang menyesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan di Kota Payakumbuh.

Faktor Penghambat :

1. Masih ada beberapa perangkat daerah yang masih belum tertib dalam hal pertanggungjawaban belanja.
2. Kebijakan, regulasi dan peraturan pengelolaan keuangan yang berubah sehingga dibutuhkan waktu untuk penyesuaian disegala aspek.
3. Kurangnya pemahaman aparatur perangkat daerah dalam pengelolaan barang / aset milik daerah.
3. Belum maksimalnya sistem teknologi informasi keuangan daerah yang mana harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan / solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas aparatur baik dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengelolaan uang dan barang, serta pelaporan keuangan daerah.
2. Menyesuaikan kebijakan-kebijakan daerah dengan aturan-aturan keuangan yang baru.
3. Terus menerus melakukan pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang mampu mengakomodir dan memudahkan.

SASARAN 2
MENINGKATNYA CAPAIAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2022 | | % | Target Akhir renstra 2022 | % |
|-----------------------------|---|------------|------------|-----------|--------|---------------------------|--------|
| | | | Target | Realisasi | | | |
| 1 | Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah | Persentase | 12 % | 18,01% | 150,08 | 12 % | 150,08 |
| Rata – rata Capaian Kinerja | | | | | 150,08 | | 150,08 |

Sasaran meningkatnya capaian penerimaan PAD dapat dilihat dari 1 (satu) indikator, yaitu kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Capaian kinerja pada indikator kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 18,01% dari target sebesar 12% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 150,08% atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya yaitu 111,08%, dan dikatakan baik karena kondisi pandemi masih belum berakhir.

Tahun 2022 adalah tahun terakhir renstra, capaian tahun 2022 sebesar 18,01 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Keuangan Daerah, maka capaian kerjanya mencapai 150,08%. Data penunjang capaian kinerja dari indikator kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dilihat daritabel berikut :

TABEL 3.8**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022 dan
2021

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2022 | % | Realisasi 2021 |
|---------------|---|------------------|-----------------|---------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 696.617.590.928 | 704.772.719.939 | 101,17 | 677.296.933.413 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 108.913.694.154 | 126.962.317.953 | 116,57 | 90.291.310.165 |
| 4.1.01. | Pajak Daerah | 19.936.853.240 | 22.033.326.343 | 110,52 | 20.359.631.895 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 7.948.097.267 | 5.833.854.340 | 73,40 | 5.448.725.559 |
| 4.1.03. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 9.493.460.178 | 9.493.460.178 | 100,00 | 7.693.095.695 |
| 4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 71.535.283.469 | 89.601.677.092 | 125,26 | 56.789.857.016 |
| 4.2. | PENDAPATAN TRANSFER | 586.803.896.774 | 576.910.401.986 | 98,31 | 568.343.603.248 |
| 4.2.01. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 547.261.060.763 | 538.515.001.673 | 98,40 | 534.136.923.988 |
| 4.2.02. | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 39.542.836.011 | 38.395.400.313 | 97,10 | 34.206.679.260 |
| 4.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 900.000.000 | 900.000.000 | 100,00 | 18.662.020.000 |
| 4.3.01. | Pendapatan Hibah | 900.000.000 | 900.000.000 | 100,00 | 879.000.000 |
| 4.3.03. | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | - | 17.783.020.000 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 752.356.007.312 | 695.915.964.175 | 92,50 | 677.726.610.137 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 622.544.994.517 | 577.363.467.901 | 92,74 | 567.600.948.466 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 356.945.256.804 | 328.320.458.462 | 91,98 | 320.454.438.227 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 251.297.404.115 | 235.849.841.467 | 93,85 | 241.510.699.923 |
| 5.1.05. | Belanja Hibah | 12.120.583.598 | 11.869.567.972 | 97,93 | 5.635.810.316 |
| 5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 2.181.750.000 | 1.323.600.000 | 60,67 | - |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 129.577.795.665 | 118.552.496.274 | 91,49 | 110.125.661.671 |
| 5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 23.696.333.833 | 22.029.941.027 | 92,97 | 19.565.837.794 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 22.573.993.776 | 19.429.430.097 | 86,07 | 20.835.763.861 |
| 5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 23.829.019.933 | 19.802.166.485 | 83,10 | 26.121.702.952 |
| 5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 57.513.924.180 | 55.351.575.875 | 96,24 | 42.586.365.655 |
| 5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.964.523.943 | 1.939.382.790 | 98,72 | 1.015.991.409 |
| 5.3. | BELANJA TIDAK TERDUGA | 233.217.130 | - | - | - |
| 5.3.01. | Belanja Tidak Terduga | 233.217.130 | - | - | - |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (55.738.416.384) | 8.856.755.764 | (15,89) | (429.676.724) |
| 6. | PEMBIAYAAN DAERAH | 55.738.416.384 | 68.165.838.303 | 122,30 | - |
| 6.1. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 61.878.416.384 | 74.305.838.303 | 120,08 | - |
| 6.1.01. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 61.878.416.384 | 74.305.838.303 | 120,08 | - |

S.I.P.K.D.

Dari tabel diatas dapat dilihat total PAD yang diperoleh Pemerintah Kota Payakumbuh sebanyak Rp. 126.962.317.953 sementara itu total pendapatan seluruhnya adalah Rp. 704.772.719.939 Sehingga jika dibandingkan jumlah PAD dari total keseluruhan penerimaan daerah, maka persentase yang diperoleh yaitu 18,01%.

Kemudian, capaian kinerja dari sasaran meningkatnya capaian penerimaan pendapatan asli daerah ini didukung oleh program pengelolaan pendapatan daerah dengan 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan.

Gambaran tentang program, kegiatan, sub kegiatan, pagu, dan realisasi anggaran terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.9
PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN
Anggaran dan Realisasi Terhadap Sasaran 2

Data Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
 Badan Keuangan Daerah

| No | SASARAN | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Keuangan | | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Masalah | Tinjut Rekomendasi DPRD | Ket |
|----|--|--|--|---|------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | | | | |
| | Meningkatnya capaian penerimaan PAD | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase realisasi PAD | 100% | 97% | 676.710.085 | 615.059.953 | 90,89% | | | | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah; Jumlah SMI yang terintegrasi; Persentase data WP yang memiliki NPWPD; Persentase pemutakhiran data Subjek Objek Pajak Daerah; Persentase realisasi WP yang tepat waktu dan membayar piutang; Jumlah regulasi pajak yang dihasilkan | 5%; 2 aplikasi; 98%; 90%; 75%; 1 regulasi | 100% | 676.710.085 | 615.059.953 | 90,89% | - | - | | |
| | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 2 rancangan | 100% | 100% | 109.212.000 | 81.167.005 | 74,32% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|--|--|--|--|
| | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 90% | 90% | 100% | 24.463.250 | 22.393.120 | 91,54% | | | | |
| | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 90% | 90% | 100% | 106.986.695 | 104.082.850 | 97,29% | | | | |
| | | | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 90% | 100% | 100% | 36.167.430 | 33.740.602 | 93,29% | | | | |
| | | | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 45.110.770 | 42.798.540 | 94,87% | | | | |
| | | | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) | 90% | 100% | 100% | 110.391.560 | 108.558.930 | 98,34% | | | | |
| | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 90% | 90% | 100% | 79.023.080 | 72.693.890 | 91,99% | | | | |
| | | | Penagihan Pajak Daerah | 100% | 100% | 100% | 82.901.360 | 76.206.326 | 91,92% | | | | |
| | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 90% | 85,42% | 85,42% | 82.453.940 | 73.418.690 | 89,04% | | | | |

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran meningkatnya capaian penerimaan pendapatan asli daerah disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. SISMIOP yang merupakan aplikasi penerimaan daerah khusus untuk PBB sudah terintegrasi dengan Bank Nagari.
2. Terdapat 2 (dua) UPTD yang khusus melakukan pelayanan yaitu UPTD pajak daerah dan UPTD Fasilitas Pembiayaan.
3. Sudah adanya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
4. Sudah ada aplikasi mobile sebagai kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah terintegrasi dengan bank daerah sehingga mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan menyajikan informasi update secara real time.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya personil dan SDM pemungut pajak daerah.
2. Masih kurangnya potensi PAD di Kota Payakumbuh yang bisa digali.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran kemandirian keuangan daerah, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan / solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM pemungut pajak daerah.
2. Ekstensifikasi sumber PAD baru.

SASARAN 3

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BKD

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKD

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2022 | | % | Target Akhir Renstra 2022 | % |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|-----|---------------------------|------|
| | | | Target | Realisasi | | | |
| 1 | Nilai AKIP BKD dari Inspektorat | Nilai AKIP | Target A | Realisasi A | 100 | A | 100% |
| Rata – rata Capaian Kinerja | | | | | 100 | A | 100% |

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilihat dari 1 (satu) indikator, yaitu Nilai AKIP BKD dari Inspektorat.

Capaian kinerja nyata dari indikator Nilai AKIP BKD dari Inspektorat adalah Nilai A dari target A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun terakhir dari renstra, capaian tahun 2022 yaitu nilai A bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan maka capaian kerjanya mencapai 100 %.

Capaian kinerja dari sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri dari 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, dan realisasi anggaran terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.11
PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN
Anggaran dan Realisasi Terhadap Sasaran 3

Data Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
 Badan Keuangan Daerah

| No | SASARAN | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Keuangan | | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Masalah | Tinjut Rekomendasi DPRD | Ket |
|----|--|--|--|-------------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | | | | |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai evaluasi AKIP oleh inspektorat; Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik; Persentase realisasi keuangan PD; Persentase sasaran program dan kegiatan renja PD yang selaras dengan renstra PD dan RKPD | A; 80%; 90%; 100% | 100% | 10.728.404.840 | 9.654.181.280 | 89,99% | | | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi (100%) | 100% | 100% | 41.805.290 | 35.199.470 | 84,20% | | | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen yang dihasilkan (2 dokumen) | 2 dokumen | 100% | 28.574.900 | 25.521.640 | 89,31% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen yang dihasilkan (4 dokumen) | 4 dokumen | 100% | 13.230.390 | 9.677.830 | 73,15% | | | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi keuangan PD terhadap aliran kas (95%) | 90% | 95% | 8.010.885.154 | 7.528.985.699 | 93,98% | | | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (62 ASN) | 62 ASN | 100% | 7.964.282.604 | 7.491.193.659 | 94,06% | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan (4 dokumen) | 4 dokumen | 100% | 46.602.550 | 37.792.040 | 81,09% | | | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang berkapasitas | 100% | 100% | 34.535.800 | 34.535.800 | 100,00% | | | | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas dan beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang dibayarkan | 65 stel | 100% | 34.535.800 | 34.535.800 | 100,00% | | | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik (80%) | 80% | 100% | 1.084.944.170 | 713.855.670 | 65,80% | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah alat listrik dan elektronik yang dibayarkan (5 jenis) | 5 jenis | 100% | 5.375.360 | 5.224.100 | 97,19% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|------|-------------|-------------|--------|--|--|--|--|
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah perlengkapan dan peralatan dinas yang dibayarkan (44 unit) | 44 unit | 100% | 193.860.210 | 180.785.876 | 93,26% | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah bahan logistik yang tersedia (4 jenis) | 4 jenis | 100% | 35.102.350 | 34.395.900 | 97,99% | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | jumlah barang cetakan, fotocopy dan jilid yang dibayarkan (3 jenis) | 3 jenis | 100% | 66.093.460 | 61.668.200 | 93,30% | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah media cetak dan buku peraturan tentang keuangan yang dibayarkan (1 media) | 1 media cetak | 100% | 6.908.790 | 6.720.000 | 97,27% | | | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | jumlah pelayanan yang diberikan kepada tamu (1200 porsi) | 1200 porsi | 100% | 64.000.000 | 42.736.325 | 66,78% | Secara keseluruhan tidak ada masalah, karena target kinerja tercapai 100%, sedangkan fasilitasi kunjungan tamu tidak dapat diprediksi kehadirannya sehingga efisiensi pada belanja makan dan minum | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|---|--|--|--|
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah aparatur yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (62 orang) | 62 orang | 100% | 713.604.000 | 382.325.269 | 53,58% | Ada beberapa perjalanan dinas keluar daerah yang tidak dapat diikuti karena kesibukan pekerjaan. Kemudian ada rapat luar daerah yang dilakukan secara hibrid, sehingga tidak semua peserta rapat harus hadir secara fisik ditempat rapat, tetapi bisa mengikuti dari jarak jauh melalui konferensi audio video (zoom meeting) | Perjalanan dimaksud adalah konsultasi terkait kebijakan baru ke pemerintah pusat, sehingga ditunda sampai tahun 2023 | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik (80%) | 80% | 100% | 247.649.426 | 231.646.952 | 93,54% | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 300 materai dan perangko | 300 materai dan perangko | 100% | 4.450.000 | 3.253.000 | 73,10% | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan rekening telp dan astinet | 12 bulan rekening telp dan astinet | 100% | 243.199.426 | 228.393.952 | 93,91% | | | | |
| S | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Aset yang terpelihara (80%) | 80% | 100% | 299.540.000 | 280.741.128 | 93,72% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | roda 4 sebanyak 1 unit | roda 4 sebanyak 1 unit | 100% | 39.190.000 | 22.010.511 | 56,16% | Kondisi mobil masih baru sehingga tidak membutuhkan banyak pemeliharaan, hanya biaya BBM dan pajak kendaraan | Tidak dapat disesuaikan lagi karena mengikuti std biaya yang ada | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | roda 2 27 unit, roda 4 8 unit | roda 2 27 unit, roda 4 8 unit | 100% | 240.350.000 | 239.151.052 | 99,50% | | | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 jenis peralatan dan perlengkapan | 5 jenis | 100% | 20.000.000 | 19.579.565 | 97,90% | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan | 100% | 80% | 1.009.045.000 | 829.216.561 | 82,18% | | | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1 unit kerja | 1 unit kerja | 100,00% | 1.009.045.000 | 829.216.561 | 82,18% | | | | |
| | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase penyaluran bantuan yang dilaksanakan (70%) | - | - | 233.217.130 | - | 0,00% | | | | |
| | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah bantuan yang tersalurkan (12 bulan) | - | - | 233.217.130 | - | 0,00% | Tahun 2022 tidak ada keadaan darurat dan keperluan mendesak | | | |

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

- Aturan serta SOP tentang pelaksanaan kerja di tingkat perangkat daerah sudah ada
- Sumber daya manusia yang sudah berpengalaman serta telah memiliki kualifikasi teknis di bidang keuangan
- Sistem aplikasi yang memudahkan kerja perangkat daerah

Faktor Penghambat :

1. belum adanya mekanisme *reward and punishment*
2. Kurangnya personil perangkat daerah sehingga satu orang mengerjakan beberapa tugas dan fungsi sekaligus.

Untuk memacu capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan / solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Membuat mekanisme Reward and Punishment bagi pegawai BKD
2. Penambahan personil di BKD

4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 15.686.800.585,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.048.489.378,64,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,56%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 kondisi anggaran adanya Silpa sebesar Rp. 1.638.311.206,36,- hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap misi renstra Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2022

| No | Misi | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | % |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, ekonomis, akuntable dan auditable | 15.010.090.500,00 | 13.433.429.425,64 | 89,49 |
| 2 | Menggali potensi dan meningkatkan pengelolaan sumber – sumber pendapatan daerah | 676.710.085,00 | 615.059.953,00 | 90,89 |
| | Jumlah | 15.686.800.585,00 | 14.048.489.378,64 | 89,56 |

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh pada Tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian misi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, dengan melihat uraian capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2022

| No | Kategori | Jumlah Indikator | Presentase Capaian Kinerja | Anggaran | |
|----------|--------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------|
| | | | | Realisasi (Rp) | % |
| A | Misi 1 | 2 | | | |
| 1 | Melebihi atau melampaui target | - | - | 13.433.429.425,64 | 89,49 |
| 2 | Sesuai target | 2 | 100 % | | |
| 3 | Tidak mencapai target | - | - | | |
| B | Misi 2 | 1 | | | |
| 1 | Melebihi atau melampaui target | 1 | 150,08 % | 615.059.953,00 | 90,89 |
| 2 | Sesuai target | - | - | | |
| 3 | Tidak mencapai target | - | - | | |

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian misi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

5. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh berhasil memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

Prestasi Tingkat Nasional

| No | Prestasi | Penghargaan | Tahun |
|----|---|-------------|-------|
| 1 | Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh TA 2021 | Opini WTP | 2022 |

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 merupakan bentuk dari pertanggungjawaban yang baik (*Good Governance*) dalam memberikan hasil kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh di tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dan evaluasi terhadap kinerja sasaran strategis, dan juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

*Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi **baik***

*Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 150,08% atau interpretasi **sangat baik***

*Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi **baik***

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi / sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada tahun anggaran 2022 ini, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target yang ingin dicapai tersebut, telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 pagu sebesar Rp. 15.686.800.585,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.048.489.378,64 atau dengan serapan dana APBD 89,56%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh kepada pihak – pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2023
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Payakumbuh



Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 19690116 199009 1 001

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kota : Payakumbuh
Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | (%) |
|-----------|--|---|---------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini LKPD dari BPK | WTP | WTP | 100% |
| 2 | Meningkatnya Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah | 12% | 18,01% | >100% |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilits Kinerja BKD | Nilai AKIP BKD dari Inspektorat | A | A | 100% |

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2022

Rp 15.686.800.585,00

JUMLAH REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Rp 14.048.489.378,64

Payakumbuh, Januari 2023
KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH



Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 19690116 199009 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2023**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | 75,0000 |

Payakumbuh, Januari 2023
KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH



Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 19690116 199009 1 001

RENCANA AKSI BKD TAHUN 2023

BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

| NO | SASARAN STRATEGIS | | | | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | | | | | |
|---|--|---|----------------|--------|------------|---------|--|-------------------|---|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | | URAIAN KEGIATAN | URAIAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | TW I | TW II | TW III | TW IV | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | SKOR IPKD | | | | 75,0000 | I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai IKM | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan PD | 2 dokumen | TW I | 2.150.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 8.937.500 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 10.087.500 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 3.924.700 |
| | | | | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 4 laporan | TW I | 1.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 3.665.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 2.825.900 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 3.133.300 |
| | | | | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase realisasi keuangan PD terhadap aliran kas | 62 ASN | TW I | 1.559.285.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 2.715.413.745 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 1.820.782.243 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 1.685.668.259 |
| | | | | | | | | | | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | | 1 dokumen | TW I | 95.400.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 97.696.500 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 96.177.500 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 97.797.900 |
| | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | 4 laporan | TW I | 11.550.000 | |
| | | | | | | | | | | | | TW II | 12.237.500 | |
| | | | | | | | | | | | | TW III | 9.165.000 | |
| | | | | | | | | | | | | TW IV | 11.300.000 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase ASN yang berkapsitas; Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap | 65 paket | TW I | 34.535.800 | | | | | | | | | |
| | | | | TW II | - | | | | | | | | | |
| | | | | TW III | - | | | | | | | | | |
| | | | | TW IV | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TW I | 22.688.000 | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | | | | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|----------------|-------|--------|-------|---------|-------------------|---|--|---|--|-------------------------|------------|--------|------------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | | URAIAN KEGIATAN | URAIAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA ANGGARAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | TW I | TW II | TW III | TW IV | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | | 1 dokumen | TW II | 1.387.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 375.200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 549.200 | | |
| | | | | | | | | | | Sosialisasi peraturan perUndang-Undangan | | 80 orang | TW I | 74.999.800 | | |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - | | |
| | | | | | | | | | | Bimtek peraturan perUndang-Undangan | | 80 orang | TW I | 95.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - | | |
| | | | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik | 8 paket | TW I | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW II | 2.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW III | 1.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW IV | 2.374.350 |
| | | | | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor | | 2 paket | TW I | 31.413.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW II | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW III | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW IV | - |
| | | | | | | | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 41 paket | TW I | 2.907.100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW II | 8.440.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW III | 10.112.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW IV | 11.386.990 |
| | | | | | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | 2 paket | TW I | 26.828.400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW II | 5.200.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 5.106.460 | | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 4.086.900 | | |
| | | | | | | | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang | | 1 dokumen | TW I | 1.680.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 1.680.000 | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | | | | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|----------------|-------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|--|--|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | | URAIAN KEGIATAN | URAIAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA ANGGARAN | | |
| 1 | 2 | 3 | TW I | TW II | TW III | TW IV | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | dan peraturan perundang-undangan | | 1 dokumen | TW III | 1.639.860 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - | |
| | | | | | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 12 laporan | TW I | - | |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 30.510.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 4.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 2.000.000 | |
| | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 30 laporan | TW I | 500.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 200.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 200.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 99.356.000 | |
| | | | | | | | | | | Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Persentase BMD yang tersedia | 12 unit | TW I | 199.775.290 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 266.090.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 11.019.800 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - | |
| | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik | 4 laporan | TW I | 1.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 1.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 1.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 749.400 | |
| | | | | | | | | | | | | 4 laporan | TW I | 60.700.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 60.700.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 60.700.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 61.099.200 | |
| | | | | | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase aset yang terpelihara | 1 unit kend dinas roda | TW I | 7.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 12.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 7.690.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 12.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | 35 unit kend dinas | TW I | 50.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 65.000.000 | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | | | | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|----------------|-------|--------|-------|--|--|--|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | | URAIAN KEGIATAN | URAIAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | TW I | TW II | TW III | TW IV | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | R2 dan R4 | TW III | 65.000.000 |
| | | | | | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 5 unit | TW IV | 60.350.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW I | 3.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 4.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 3.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 3.960.000 |
| | | | | | | | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja | TW I | 189.648.425 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 209.240.337 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 226.039.787 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 384.116.451 |
| | | | | | | | II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah | -Persentase realisasi belanja thd anggaran; - Laporan keuangan berbasis akrual; - Perda APBD tepat waktu | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Persentase Dokumen penganggaran yang dihasilkan | 2 dokumen | TW I | 9.488.500 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 6.637.250 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 16.245.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW I | - |
| | | | | | | | | | | | | 2 dokumen | TW II | 20.928.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 11.442.750 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW I | - |
| | | | | | | | | | | | | 1 dokumen | TW II | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 17.444.750 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW I | 8.185.200 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | - |
| | | | | | | | | | | | | 1 dokumen | TW III | 14.760.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW I | 4.465.850 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | - |
| | | | | | | | | | | | | 31 dokumen | TW III | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - |

| NO | SASARAN STRATEGIS | | | | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|----------------|-------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | | URAIAN KEGIATAN | URAIAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA ANGGARAN | | |
| 1 | 2 | 3 | TW I | TW II | TW III | TW IV | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | 31 dokumen | TW I | 3.653.250 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 2.332.600 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | - | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - | |
| | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan peraturan Daerah tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | 2 dokumen | TW I | 324.724.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 310.862.800 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 353.182.100 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 291.250.000 | |
| | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | 2 dokumen | TW I | 11.003.500 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 2.400.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 58.065.900 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - | |
| | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | 3 dokumen | TW I | 30.793.800 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 12.251.800 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | - | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - | |
| | | | | | | | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | 3 dokumen | TW I | 3.028.580 | |
| | | | | | | | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Persentase meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah | | | TW II | 1.971.400 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | - | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - | |
| | | | | | | | | | | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | 124 dokumen | TW I | 7.498.260 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 2.655.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 2.846.400 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - | |
| | | | | | | | | | | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana | | 60 dokumen | TW I | 40.126.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 31.051.400 | |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 30.001.400 | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | | | | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|----------------|-------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | | URAIAN KEGIATAN | URAIAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA ANGGARAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | TW I | TW II | TW III | TW IV | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | TW IV | 1.416.000 | | |
| | | | | | | | | | | Koordinasi Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan PFK | 750 laporan | | TW I | 12.659.120 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TW II | 8.044.520 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TW III | 4.296.340 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TW IV | - | |
| | | | | | | | | | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi Terkait | 384 dokumen | | TW I | 15.015.480 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TW II | 20.200.620 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TW III | 13.001.720 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TW IV | 283.600 | |
| | | | | | | | | | | Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan | 2 dokumen | | TW I | 1.899.980 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TW II | 23.100.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TW III | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | TW IV | - | |
| | | | | | | | | | | Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kab/kota | 80 orang | | TW I | 110.741.420 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TW II | 160.347.680 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TW III | 154.010.760 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TW IV | 99.900.000 | |
| | | | | | | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan PD | 4 laporan | | TW I | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW II | 938.400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW III | 2.298.780 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW IV | 750.000 |
| | | | | | | | | | | Rekonsiliasi dan Verifikasi | | | TW I | 95.691.150 | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | | | | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|----------------|-------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | | URAIAN KEGIATAN | URAIAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | TW I | TW II | TW III | TW IV | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | Aset,Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | 87 dokumen | TW II | 104.250.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 98.675.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 93.600.000 |
| | | | | | | | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan ,Triwulanan dan semesteran | | 21 laporan | TW I | 9.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 1.110.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 16.705.550 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 14.687.550 |
| | | | | | | | | | | Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | 37 laporan | TW I | 119.498.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 83.215.300 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 78.600.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 78.600.000 |
| | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | 2 dokumen | TW I | 16.672.600 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 37.632.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - |
| | | | | | | | | | | Koordinasi ,Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | | 2 dokumen | TW I | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 7.082.200 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - |
| | | | | | | | | | | Penyusunan analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | | 1 dokumen | TW I | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 7.066.650 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - |
| | | | | | | | | | | Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional | | 1 dokumen | TW I | 6.538.200 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | - |

| NO | SASARAN STRATEGIS | | | | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|----------------|-------|--------|-------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | | URAIAN KEGIATAN | URAIAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | TW I | TW II | TW III | TW IV | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase OPD yang telah mengelola BMD dengan baik | Pengelolaan barang milik daerah | Penyusunan standar harga | Persentase BMD dan aset kota yang dikelola dengan baik | 1 dokumen | TW II | 69.988.970 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 3.410.630 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - |
| | | | | | | | | | | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah | | 1 dokumen | TW I | 7.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 14.503.150 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 12.007.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 8.224.100 |
| | | | | | | | | | | Penatausahaan barang milik daerah | | 31 laporan | TW I | 30.405.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 230.472.850 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 1.443.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 4.707.000 |
| | | | | | | | | | | Penilaian barang milik daerah | | 31 laporan | TW I | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 4.163.750 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 35.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - |
| | | | | | | | | | | Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah | | 31 dokumen | TW I | 173.857.980 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 172.995.750 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 194.650.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 164.750.000 |
| | | | | | | | | | | Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah | | 31 laporan | TW I | 21.044.751 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 22.889.701 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 11.873.751 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 22.889.697 |
| | | | | | | | | | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | 31 laporan | TW I | 9.227.650 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - |
| | | | | | | | | | | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota | | 31 Orang | TW I | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | - |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 35.566.100 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - |

| NO | SASARAN STRATEGIS | | | | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|----------------|-------|--------|-------|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | | URAIAN KEGIATAN | URAIAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA ANGGARAN | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | TW I | TW II | TW III | TW IV | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase kualitas pengelolaan penerimaan daerah | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah | 2 dokumen | TW I | 13.270.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | TW II | 13.270.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TW III | 70.345.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TW IV | 6.105.000 |
| | | | | | | | | | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | 12 laporan | TW I | 2.000.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TW II | 6.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TW III | 21.888.150 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TW IV | 850.000 | | |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | 10 unit | TW I | 106.407.950 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TW II | 14.718.045 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TW III | 4.525.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TW IV | - | | |
| | | | | | | | | | | | Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah | | 12 laporan | TW I | 6.150.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TW II | 15.744.650 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TW III | 5.275.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TW IV | 7.025.000 | | |
| | | | | | | | | | Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah | | 1 laporan | TW I | 11.837.500 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW II | 13.369.900 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW III | 12.024.050 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW IV | 10.134.620 | | | | |
| | | | | | | | | | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | 2 objek pajak | TW I | 11.075.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW II | 13.686.150 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW III | 8.075.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW IV | 83.075.000 | | | | |
| | | | | | | | | | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | 12 dokumen | TW I | 7.500.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW II | 31.445.675 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW III | 22.179.725 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TW IV | 28.000.000 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | | | | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|----------------|-------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | | URAIAN KEGIATAN | URAIAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | TW I | TW II | TW III | TW IV | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | 1 layanan | TW I | 76.225.540 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 808.870 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 2.008.870 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 6.552.150 |
| | | | | | | | | | | Penagihan Pajak Daerah | | 1 dokumen | TW I | 28.904.680 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 24.437.250 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 19.200.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 19.200.000 |
| | | | | | | | | | | Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah | | 12 dokumen | TW I | 34.868.120 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 19.875.950 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 19.300.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 5.135.900 |
| | | | | | | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | 1 laporan | TW I | 18.134.000 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 24.782.400 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 31.870.100 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | 8.469.000 |
| | | | | | | | | | | Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah | | 12 laporan | TW I | 12.182.550 |
| | | | | | | | | | | | | | TW II | 24.426.280 |
| | | | | | | | | | | | | | TW III | 17.064.840 |
| | | | | | | | | | | | | | TW IV | - |

Payakumbuh, Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH



Drs. SYAFWAL, MM

NIP. 19690116 199009 1 001